

KEGIATAN BINA DESA (BHAKTI SOSIAL MENATA DESA DALAM PENGENTASAN DESA TERTINGGAL (Studi di Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

Fitria Niafatin, Suryadi, Mochamad Rozikin

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: niafatin@gmail.com

Abstract: *The Activity of Bina Desa (Village Reforming Social Service) in Taking of Underdevelopment Village (Study at Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang).* The condition of Desa Duwet which is relatively as remote village by hills topography and based on 15 criteria of underdevelopment village made Desa Duwet as one of underdevelopment village in Kabupaten Malang. Government which is supported by SKPD Kabupaten Malang has made the development as the priority in order to alleviate underdevelopment villages with the activity of Bina Desa (Village Reforming Social Services) to visiting the village and doing the real activities in underdevelopment village. The aim of this study is describes the form and the output of Bina Desa activity in taking of underdevelopment village. The types of this research is descriptive qualitative approach. The result of the study show that the form of Bina Desa activity consists of physical and non-physical development. The output which are not maximized. Based on the result of the study, the researcher gives the suggestion, there are re-evaluation and safeguarding Bina Desa activity.

Keywords: *Bina Desa activity., underdevelopment village, Desa Duwet*

Abstrak: **Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dalam Pengentasan Desa Tertinggal (Studi di Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang):** Kondisi Desa Duwet yang relatif terpencil dengan topografi perbukitan dan berdasarkan 15 kriteria desa tertinggal menjadikan status Desa Duwet sebagai salah satu desa tertinggal di Kabupaten Malang. Pemerintah yang didukung oleh seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Malang telah menjadikan prioritas pembangunan dalam rangka pengentasan desa tertinggal dengan kegiatan Bina Desa untuk berkunjung ke desa dan melakukan aktivitas yang nyata di desa tertinggal. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk serta *output* kegiatan Bina Desa dalam pengentasan desa tertinggal. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kegiatan Bina Desa meliputi pembangunan fisik dan non fisik serta *output* dalam pengentasan desa tertinggal yang dinilai belum cukup berhasil. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran yaitu: mengevaluasi kembali serta melakukan pengamanan (*safeguarding*) kegiatan Bina Desa.

Kata kunci: kegiatan Bina Desa, desa tertinggal, Desa Duwet

Pendahuluan

Penyelenggaraan fungsi pemerintah di suatu negara tidak dapat dilepaskan dari segi-segi politik, pemerintahan, pembangunan, dan ke-masyarakat. Fungsi pemerintah dalam pembangunan erat kaitannya dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya secara merata dalam bidang spiritual maupun materil berdasarkan nilai-nilai pancasila. Seiring dengan kemajuan zaman menjadikan perlunya upaya-upaya dalam melakukan transformasi struktur sosial, ekonomi, dan politik, sehingga kebijakan

pemerataan pembangunan lebih ditekankan. Pemerataan pembangunan diyakini akan mampu mengurangi kesenjangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya tidak hanya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga berupaya mengurangi jumlah wilayah tertinggal di Indonesia.

Berdasarkan Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PDT) tahun 2010 realisasi dari prioritas nasional dalam pengentasan daerah tertinggal tersebut ditargetkan dapat mengentaskan 50 kabupaten tertinggal menjadi daerah maju pada tahun 2014 (KPDT, 2010). Wilayah atau desa tertinggal ini

dinilai menjadi bagian terpenting dari pembangunan Indonesia dalam pengurangan jumlah desa tertinggal yang ada di suatu daerah.

Berdasarkan Stranas PDT, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) telah mengadopsi model kebijakan pembangunan daerah tertinggal di wilayah perdesaan yang dikenal dengan model “Bedah Desa” (KPDT, 2010). Sesuai dengan yang dilaksanakan oleh KPDT dalam pembangunan daerah tertinggal di wilayah perdesaan, maka pemerintah Kabupaten Malang juga mempunyai kegiatan Bina Desa. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/121/KEP/421.013/2011 tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat yang berisi tiga bentuk kegiatan yaitu NGOPI bareng Bung Rendra (Ngobrol Pagi Bersama Bung Rendra), yaitu *talk show* bersama RRI (Radio Republik Indonesia) Malang yang melibatkan unsur pemerintahan di Kabupaten Malang sesuai tematik/permasalahan yang dibahas sekaligus “on air”, Anjangsana 33 (tiga puluh tiga) kecamatan yaitu menyosialisasikan visi dan misi Kabupaten Malang oleh Bupati, dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) untuk mendorong percepatan pembangunan di desa-desa tertinggal sekaligus memberikan perhatian kepada masyarakat desa tertinggal di wilayah Kabupaten Malang.

Penetapan status desa tertinggal tersebut berlandaskan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/183/KEP/421.013/2013 tentang Penetapan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Malang, maka penetapan status tersebut berdasarkan hasil *self assessment* tahun 2012 dengan berpedoman pada 15 kriteria desa tertinggal yaitu: (1) jalan utama desa yang melewati balai desa, (2) lapangan usaha mayoritas penduduk, (3) fasilitas pendidikan, (4) fasilitas kesehatan, (5) tenaga kesehatan, (6) sarana komunikasi, (7) jumlah sarana komunikasi, (8) sumber air minum/masak penduduk, (9) sumber bahan bakar penduduk, (10) persentase rumah tangga pengguna listrik, (11) persentase rumah tangga pertanian, (12) keadaan sosial ekonomi penduduk, (13) kemudahan mencapai puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya, (14) kemudahan ke pasar permanen, dan (15) kemudahan mencapai pertokoan. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut terdapat 51 desa dengan status tertinggal atau sangat tertinggal yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2012 dengan berpedoman pada 15 kriteria desa tertinggal tersebut, Desa Duwet Kecamatan Tumpang mendapatkan skor 36 dengan status sebagai desa tertinggal. Status tersebut didukung

dengan letak geografis Desa Duwet yang relatif terpencil dengan topografi perbukitan dan hasil *self assessment* diantaranya diperoleh dari data kondisi jalan sebesar 45% masih mengalami kerusakan, lapangan usaha mayoritas penduduknya pada sektor pertanian yaitu sebagai buruh, fasilitas pendidikan, kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang terbatas, jumlah sarana komunikasi yang terbatas, sumber bahan bakar penduduk mayoritas adalah kayu bakar, persentase rumah tangga pengguna listrik masih mencapai 60%-90%, dan persentase rumah tangga pertanian >87,5%.

Status Desa Duwet sebagai desa tertinggal menjadikannya sebagai salah satu desa yang diprioritaskan pengentasannya pada tahun 2013, sehingga desa tersebut terpilih sebagai sasaran kegiatan Bina Desa pada tanggal 27-28 Mei 2013 yang bertepatan dengan peringatan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM) X Kabupaten Malang serta Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-41 Kabupaten Malang. Melalui kegiatan Bina Desa tersebut, diharapkan dirasakan manfaatnya. Hal tersebut dikarenakan banyak kegiatan yang bertujuan baik ternyata tidak membawa *output* (hasil) yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam jangka pendeknya perlu diperhatikan hasil-hasil kegiatannya, dan menyimak keluaran/hasil (*output*), sehingga dalam waktu yang relatif panjang mampu terlihat dampak, dan hasil akhir (*outcome*) dari pembangunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan perumusan masalahnya adalah apa saja bentuk-bentuk dan *output* kegiatan Bina Desa dalam pengentasan desa tertinggal di Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi yang berkenaan dengan bentuk-bentuk dan *output* kegiatan Bina Desa dalam pengentasan desa tertinggal di Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Kontribusi penelitian ini meliputi kontribusi akademis dan kontribusi praktis.

Tinjauan Pustaka

A. Ilmu Administrasi Pemerintahan

Menurut Syafiie (2007, h.66) Ilmu administrasi pemerintahan adalah disiplin ilmu sosial yang secara khas melihat fungsi administrasi dalam pelaksanaan kebijakan negara yang dijalankan oleh pejabat pemerintah. Peranan utama pemerintahan adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan pemerintah pada umumnya dalam rangka memberikan pe-

ngayoman dan pelayanan untuk mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga mempunyai peran penting dalam pembangunan seperti yang dijelaskan oleh Affifuddin (2010, h.108) bahwa peran pemerintah dalam pembangunan adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang meliputi kegiatan-kegiatan penyusunan rencana, pemrograman, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan nasional secara efektif dan efisien.

B. Pembangunan

Menurut Budiman (2000, h.13-14) pembangunan yang sebenarnya meliputi dua unsur pokok. *Pertama*, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi. *Kedua*, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Menurut Korten sebagaimana yang dikutip oleh Suryono (2006, h. 24) pembangunan kualitas manusia adalah upaya peningkatan kapasitas manusia untuk mempengaruhi dan mengatur masa depannya.

Beberapa paradigma pembangunan menurut Suryono (2006, h.15) mulai dari strategi pertumbuhan, pertumbuhan dengan pemerataan, teknologi tepat guna, kebutuhan dasar pembangunan, pembangunan berkelanjutan, konsep pemberdayaan, dan paradigma pembangunan berpusat pada manusia. Pendekatan pemerataan muncul dari timbulnya ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan pada proses pertumbuhan. Menurut Yansen (2013, h.122) pendekatan pemerataan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang menekankan pada pendekatan langsung untuk menangani masalah kebutuhan dasar masyarakat, misalnya sandang, pangan, papan/pemukiman, dan juga dalam upaya peningkatan pelayanan publik dalam hal pendidikan, air bersih, transportasi, dan kesehatan.

C. Program dan Proyek Pembangunan

Pengertian program menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah “instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.” Menurut Domai (2010, h.15) sebuah program merupakan sekumpulan proyek-proyek tertentu yang saling menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai tindakan dan kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan secara keseluruhan.

Secara garis besar setiap program atau kegiatan dimulai adanya *input-proses-output-outcome-dampak*. *Input* sebagai masukan dari suatu kegiatan. Proses sebagai pengelolaan suatu *input*, sedangkan *output* merupakan hasil kerja/*output* menunjukkan apa yang dicapai dari pelaksanaan program pembangunan dalam rangka pencapaian maksud program. Biasanya hasil kerja merupakan hasil-hasil yang dicapai dari sejumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan melalui sejumlah program, dengan kata lain hasil kerja merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dijelaskan oleh Riyadi (2004, h. 221).

D. Kegiatan Pembangunan Desa Tertinggal

Ketertinggalan (*underdevelopment*) bukan merupakan sebuah kondisi tidak terdapat perkembangan (*absence of development*), karena pada hakikatnya setiap manusia atau kelompok manusia akan melakukan sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya walaupun itu hanya sedikit. Desa tertinggal memiliki keterbatasan fungsi dan fasilitas dibandingkan dengan kawasan perkotaan, sehingga diperlukannya pembangunan. Menurut Adisasmita (2006, h.3) pembangunan perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai usaha peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) perdesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan perdesaan.

Selain itu, pembangunan desa dapat diwujudkan dalam suatu program ataupun kegiatan yang memang fokus pada kebutuhan masyarakat, maka pendekatan pembangunan desa bersifat *bottom-up* yang diperkuat dengan pendekatan partisipatif. Menurut Adisasmita (2006, h.8) pembangunan perdesaan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana perdesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, dan lingkungan permukiman);
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap daerah yang miskin);
- e. Peningkatan keterkaitan antar daerah perdesaan dan antar daerah perdesaan dengan daerah perkotaan (*inter rural-regional-urban relationship*).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2010, h.6) pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian, pendekatan ini digunakan karena dapat mengetahui bentuk-bentuk dan *output* kegiatan Bina Desa dalam pengentasan desa tertinggal di Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yang kemudian dideskripsikan dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan. Fokus dalam penelitian ini adalah (1) Bentuk-bentuk kegiatan Bina Desa di Desa Duwet yang meliputi (a) Pembangunan fisik dan (b) Pembangunan non fisik, dan (2) *output* kegiatan Bina Desa dalam pengentasan desa tertinggal di Desa Duwet.

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Malang dan yang menjadi situs penelitian adalah Desa Duwet Kecamatan Tumpang. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dengan cara wawancara dan merekamnya dengan *handphone recorder*, mengamati secara langsung keadaan yang berkaitan dengan objek penelitian dan mendokumentasikannya dengan kamera, sedangkan instrumen pelengkap lainnya adalah catatan lapangan yang merupakan catatan selama berlangsungnya penelitian di lapangan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif oleh Miles and Huberman (1992, h.16) yang dimulai dengan mengumpulkan data yang dilanjutkan dengan tiga alur kegiatan yang terjadi yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pembahasan

1. Bentuk-bentuk Kegiatan Bina Desa dalam Pengentasan Desa Tertinggal di Desa Duwet

Fungsi pemerintah dalam pembangunan adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang meliputi kegiatan-kegiatan penyusunan rencana, pemrograman, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sebagaimana yang dijelaskan oleh Afiffuddin (2010 h.108). Fungsi pemerintah dalam pembangunan tersebut yang juga menjadi fokus utama pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Malang khususnya dalam percepatan pengentasan desa tertinggal. Program dan kegiatan dalam rangka pengentasan desa tertinggal sudah tepat dijadikan program

prioritas pembangunan. Prioritas dan arah pembangunan yang tepat akan mampu mendukung peningkatan skor desa tertinggal sesuai dengan hasil *self assessment* tahun 2012 yang ditetapkan berdasarkan 15 kriteria desa tertinggal. Salah satu kegiatan tersebut adalah kegiatan Bina Desa.

Kegiatan Bina Desa pada tanggal 27-28 Mei 2013 direalisasikan di Desa Duwet yang merupakan desa tertinggal dan target pengentasannya pada tahun 2013. Kegiatan Bina Desa dilaksanakan selama 2 hari 1 malam di Desa Duwet yang bertepatan dengan peringatan BBGRM dan HKG ke-41 Kabupaten Malang. Secara umum bentuk-bentuk kegiatan Bina Desa oleh Bupati bersama SKPD Kabupaten Malang di Desa Duwet yaitu setelah kedatangan dilanjutkan kegiatan olah raga *volly ball* bersama masyarakat pada sore hari, pada malam hari acara dialog/temu warga, pada pagi harinya setelah sholat subuh dilanjutkan acara sambang warga ke rumah-rumah disekitar masjid, olah raga pagi dan kerja bhakti yang juga diikuti kegiatan pelayanan publik seperti pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga), dan Akta Kelahiran, layanan kesehatan, penyaluran bantuan sosial keagamaan, bantuan warga miskin dan observasi pada potensi desa yang bisa dikembangkan.

Bentuk-bentuk kegiatan Bina Desa tersebut meliputi kegiatan fisik dan non fisik yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan akses atau layanan dan fasilitas publik, menyelaraskan pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, pencapaian visi misi Madep Manteb (M2) Kabupaten Malang serta meningkatkan skor-skor desa tertinggal, sehingga mampu memberikan suatu hasil/*output* dalam pengentasan desa tertinggal di Desa Duwet. Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Malang telah dipilih sebagai *leading sector* kegiatan Bina Desa yang memiliki peran strategis dalam kegiatan Bina Desa. Rangkaian kegiatan Bina Desa di Desa Duwet Kecamatan Tumpang telah dilaksanakan, baik itu pelatihan ataupun kegiatan yang lainnya sesuai *rundown*, rangkaian kegiatan SKPD, dan daftar bantuan-bantuan.

2. *Output* Kegiatan Bina Desa dalam Pengentasan Desa Tertinggal di Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Setiap program atau kegiatan dimulai adanya *input-proses-output-outcome-dampak*. *Input* sebagai masukan dari suatu kegiatan. Proses sebagai pengelolaan suatu *input*, sedangkan *output* merupakan hasil kerja/*output*

me-nunjukkan apa yang dicapai dari pelaksanaan program pembangunan dalam rangka pencapaian maksud program. Biasanya hasil kerja merupakan hasil-hasil yang dicapai dari sejumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan melalui sejumlah program, dengan kata lain hasil kerja merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dijelaskan oleh Riyadi (2004 h. 221).

Kegiatan Bina Desa di Desa Duwet meliputi kegiatan pembangunan fisik dan non fisik, yaitu:

1. Pembangunan Fisik

a. Pembangunan Jalan

Pembangunan fisik salah satunya diwujudkan dalam program padat karya yang bentuknya pembangunan infrastruktur jalan desa. Jalan yang semula dari tanah liat dapat ditingkatkan menjadi makadam dan yang sudah makadam dapat ditingkatkan menjadi jalan cor. Jalan di Desa Duwet sudah diaspal dan dicor, namun masih berlubang dan aspal yang ada mulai mengelupas. Tidak hanya pembangunan jalan desa, tetapi juga dilakukan pembangunan jalan tembus menuju ke Desa Duwet Krajan. Pembangunan jalan tembus tersebut telah mendukung tersedianya infrastruktur jalan desa yang memadai serta memberikan manfaat untuk warga terhadap akses fasilitas perekonomian seperti pengiriman sapi perah, pasir, mempermudah akses ke fasilitas pendidikan/sekolah, kesehatan /polindes. Selain mempermudah aktivitas warga, pembangunan jalan tersebut memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun jalan secara bersama-sama (gotong-royong).

b. Pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) dan Plesterisasi Rumah Penduduk

Pembangunan MCK dan plesterisasi rumah penduduk yang dilatarbelakangi oleh minimnya jumlah penduduk Desa Duwet yang memiliki jamban dan banyak rumah penduduk yang masih belum memenuhi kriteria rumah sehat diantaranya masih banyak rumah yang berlantai tanah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan stimulan kepada warga. Jumlah MCK yang diberikan ada 3 (tiga) buah, sedangkan plesterisasi rumah warga diberikan kepada 5 (lima) orang. Keberadaan MCK sudah dimanfaatkan warga, namun kondisinya sempit dan kurang memadai seperti tidak adanya atap, pintu, dan akses air bersih yang permanen. Hal tersebut belum mampu mendukung tujuan awal pembangunan MCK untuk memberikan MCK yang layak kepada warga karena meskipun sudah dibangun, warga juga masih menggunakan

jamban yang lama. Selain karena faktor kelayakan MCK yang dibangun, juga perilaku masyarakat yang masih sulit untuk berubah.

Menurut Korten sebagaimana dikutip oleh Suryono (2006, h.24) pembangunan kualitas manusia adalah upaya meningkatkan kapasitas manusia untuk mempengaruhi dan mengatur masa depannya. Usaha untuk merubah perilaku masyarakat (*changing society behavior*) tidaklah mudah dan diperlukan syarat tertentu seperti tingkat pendidikan masyarakat, kesejahteraan, dan budaya terbuka dengan dunia luar, sehingga masyarakat lebih responsif terhadap suatu perubahan atau hal-hal baru. Masuknya nilai-nilai baru ke dalam nilai-nilai lokal cukup efektif dalam melakukan perubahan kepada masyarakat, sehingga diperlukan pendampingan yang merupakan suatu metode yang penekanannya (*stressing*) pada peningkatan keterampilan untuk melakukan sesuatu karena pada dasarnya memang masyarakat akan rajin ketika didatangi pemerintah.

2. Pembangunan non Fisik dalam Pembangunan SDM melalui Sosialisasi atau Pembinaan

Percepatan pembangunan dalam pengembangan desa tertinggal tidak hanya dilakukan dalam kegiatan pembangunan fisik saja, tetapi juga pembangunan non fisik yaitu dalam pembangunan SDM yang dinilai penting dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dan memberikan posisi masyarakat, selain sebagai sasaran pembangunan juga sebagai subjek yang mampu memberikan kontribusi signifikan. Pembangunan SDM tersebut melalui sosialisasi dan juga pembinaan yang merupakan bagian dari pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Manusia sebagai subjek sekaligus sasaran pembangunan memiliki peranan penting yang keberadaannya memerlukan perhatian dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya masyarakat. Tidak hanya bantuan-bantuan saja yang diperlukan oleh masyarakat, tetapi juga harus ada ilmu-ilmu atau pengarahan yang diberikan oleh dinas-dinas terkait pada saat Bina Desa.

Bantuan-bantuan yang diberikan seperti bantuan pembangunan jalan, MCK, plesterisasi, sembako, peralatan pembuatan kue, peralatan perbengkelan, pembuatan biogas, lampu hemat energi, buku dan alat tulis, serta bantuan pemeriharaan masjid. Berbeda dengan agenda sosialisasi atau pembinaan yang dilakukan, pemberian bantuan-bantuan ini ada yang diberikan secara langsung dan juga ada yang secara simbolis pada saat acara dialog/temu warga, bahkan pada saat sebelum Bina Desa

sudah ada bantuan-bantuan. Kegiatan Bina Desa tersebut mendukung program yang sebelumnya sudah dilaksanakan dan pada saat Bina Desa berlangsung kegiatan yang belum selesai diselesaikan bersama-sama.

Program dalam kegiatan Bina Desa di Desa Duwet sudah cocok beberapa diantaranya adalah bantuan pembangunan jalan, MCK, plesterisasi, sembako, peralatan pembuatan kue, pembuatan biogas, lampu hemat energi, serta buku dan alat tulis untuk siswa. Beberapa yang kurang tepat karena ada yang sudah terealisasi dan tidak berhasil seperti bantuan ikan lele yang tidak cocok dengan kondisi (suhu) di Desa Duwet, bantuan yang sudah terealisasi tetapi tidak dimanfaatkan/dikembangkan seperti bantuan alat perbungkelan kepada karang taruna di Desa Duwet karena sudah banyak bengkel jadi tidak laku, bahkan ada bantuan yang belum terealisasi seperti bantuan pemeliharaan masjid.

Hal tersebut diharapkan menjadikan setiap program terealisasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dengan memperhitungkan keadaan/potensi, serta karakteristik lingkungan setempat. Selain sebagai stimulan, bantuan tersebut juga sebagai sarana untuk memperbaiki penghidupan masyarakat yang dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Desa Duwet. Terdapat kemungkinan bahwa dalam bantuan tersebut terdapat hal-hal baru yang mendorong masyarakat untuk terlebih dahulu mengenali dan mempelajarinya, sehingga perlu didukung adanya pembinaan, pengenalan teknologi, dan program-program pendukung.

Dukungan dalam penguatan kapasitas dan pendampingan atau pembinaan kelompok usaha yang bersifat komprehensif pada kegiatan produksi, teknologi, manajemen, pemasaran, dan kelembagaan sangatlah dibutuhkan. Masyarakat desa khususnya Desa Duwet, pada dasarnya adanya bantuan ataupun tidak adanya bantuan, pembangunan masyarakat desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis pemerintah dalam usaha memecahkan masalah sosial dan ekonomi masyarakat termasuk di Desa Duwet yang masih perlu penyesuaian dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyatnya, pengentasan kemiskinan, dan ketertinggalan yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, belum semua bantuan direalisasikan dan masih minimnya tindak lanjut dari warga terhadap bantuan yang diberikan. Tidak hanya bantuan yang diberikan, beberapa sosialisasi atau pembinaan juga dilakukan seperti pembinaan pentingnya keberlanjutan pendidikan anak-anak bagi orang tua/wali murid, koordinasi/sosialisasi

kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan/pertanian dan peternakan, pengenalan internet untuk siswa dan juga sosialisasi penggunaan kompor LPG yang mendukung kondisi Desa Duwet pada kriteria 9 (sembilan) desa tertinggal yaitu pada poin sumber bahan bakar penduduk yang sebagian besar menggunakan kayu bakar. Sosialisasi tersebut telah memberikan suatu ilmu baru seperti warga sudah bisa menghidupkan kompor dan tidak takut lagi menggunakan LPG, namun warga selain menggunakan LPG juga masih menggunakan kayu bakar dengan tujuan menghemat dan hal tersebut sudah biasa bagi penduduk Desa Duwet.

Adanya sosialisasi ataupun pembinaan yang dilakukan dapat mendukung pembangunan SDM yang selama ini masyarakat tidak tahu menjadi tahu. Selain itu, Bina Desa sebagai sarana pembelajaran untuk masyarakat utamanya di desa tertinggal yang pemerintah dan masyarakatnya dapat terbuka, serta dapat menambah pengetahuan walaupun tidak banyak. Acara Bina Desa selama 2 (dua) hari tersebut terkesan hanya sekilas saja, paling tidak warga Desa Duwet merasa pernah dikunjungi oleh orang-orang besar dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Malang.

Kegiatan Bina Desa mendukung program-program lain yang juga fokus pada desa tertinggal. Keberadaan program tersebut saling terintegrasi yang menurut Domai (2010, h.15) pembangunan yang dianggap tepat adalah yang mampu membawa keadilan dan mengangkat derajat kemanusiaan. Sebuah program merupakan sekumpulan proyek-proyek tertentu yang saling menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai tindakan serta kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan secara keseluruhan. Kegiatan Bina Desa pun terintegrasi dengan program lainnya di Desa Duwet seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lomba P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera).

Kenyataan dan harapan pemerintah Desa Duwet dan juga masyarakat berharap dengan adanya Bina Desa ada prioritas pada desa yang dibina. Banyak bantuan-bantuan yang digelontorkan ke desa tertinggal tidaklah cukup begitu saja, pengarahan dari masing-masing dinas terkait yang lebih baik sangat dibutuhkan untuk menuju masyarakat yang sukses dan bisa mandiri. *Output* kegiatan Bina Desa ini penting untuk terus dipantau agar tidak sia-sia begitu saja. Adanya kegiatan Bina Desa ini tidak hanya peranan pemerintah Kabupaten Malang, tetapi juga peranan pemerintah desa menjadi lebih

diberdayakan. Kesiapan pemerintah desa menjadikan pemerintah daerah tidak lagi memperlakukan desa sebagai objek untuk memenuhi kepentingannya yang bersifat politis maupun ekonomis, tetapi lebih bersifat mandiri sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator yang akan mendorong kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik. Desa diberikan kesempatan dalam membangun kemandirianya melalui sistem pemerintahan yang aspiratif. Disadari bahwa pembangunan *knowledge* masyarakat pada umumnya memang tidak lahir dari kalangan birokrat saja. Peran serta masyarakat setempat/lokal juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi dan mengukuhkan upaya-upaya lokal yang sudah ada.

Kesimpulan

Kegiatan Bina Desa merupakan salah satu kegiatan dalam mendukung pembangunan desa tertinggal di Kabupaten Malang agar jurang kesenjangan tidak semakin melebar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa bentuk-bentuk kegiatan Bina Desa di Desa

Duwet yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Pada pembangunan fisik yaitu perbaikan jalan desa, bantuan MCK, plesterisasi, dan bantuan-bantuan lainnya. Kegiatan tersebut belum cukup berhasil, yang ditandai dengan (1) kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan, (2) bantuan MCK yang diberikan secara kuantitas dan kualitas masih kurang, dan (3) bantuan alat-alat yang diberikan kepada masyarakat belum termanfaatkan secara maksimal, bahkan ada yang belum direalisasikan.

Pembangunan non fisik dalam membangun sumber daya manusia dengan sosialisasi ataupun pembinaan juga belum cukup berhasil yang ditandai dengan (1) waktu yang terbatas pada saat Bina Desa, (2) pendampingan dari pemerintah Kabupaten Malang yang belum maksimal, dan (3) minimnya tindak lanjut dari penduduk Desa Duwet. *Output* kegiatan Bina Desa di Desa Duwet secara umum adalah (1) mendekatkan pemerintah Kabupaten Malang dengan masyarakat Desa Duwet, (2) banyak bantuan yang mengalir ke Desa Duwet, dan (3) mendukung pembangunan infrastruktur serta pembangunan SDM masyarakat Desa Duwet.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). **Membangun Desa Partisipatif**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afiffuddin. (2010). **Pengantar Administrasi Pembangunan**. Bandung: Alfabeta.
- Budiman, Arief. (2000). **Teori Pembangunan Dunia Ketiga**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dokumen Daftar Desa Tertinggal di Kabupaten Malang Berdasarkan Hasil Self Assesment Tahun 2012 Beserta Daftar SKPD**. Malang, Bagian Tata Pemerintahan Umum.
- Domai, Tjahjanulin. (2010). **Desentralisasi dan Perencanaan Pembangunan**. Malang: Lab Administrasi Pemerintahan FIA UB.
- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). (2010). **Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal** {Internet}. Available from: Netlibrary <<http://satupemerintah.net/ProgramRenstras/download/44.Pdf>> [Accessed 4 October 2013].
- Miles, M.B, and Huberman, A.M. (1992). **Analisis Data Kualitatif**. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. (2010). **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. (2004). **Perencanaan Pembangunan Daerah**. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/121/KEP/421.013/2011 tentang Penetapan Program “Bupati Menyapa Rakyat”**. Malang, Bagian Tata Pemerintahan Umum.
- Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/183/KEP/421.013/2013 tentang Penetapan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Malang**. Malang, Bagian Tata Pemerintahan Umum
- Suryono, Agus. (2006). **Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial**. Malang: UM Press.
- Syafiee, Inu Kencana. (2007). **Pengantar Ilmu Pemerintahan**. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta, Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Yansen. (2013). **Gerakan Desa Membangun**. Malang: PT. Danar Wijaya.